

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Rizky Budi Tyaswarman

No. Mahasiswa: 18312269

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Paradiatja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uui.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2021/2022, hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : RIZKY BUDI TYASWARMAN
NIM : 18312269
Judul Tugas Akhir : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Pada
Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)
Dosen Pembimbing : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : B+
Referensi : Tidak Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFra.
Anggota Tim : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Yogyakarta, 02 August 2022

Ketua Program Studi Akuntansi,



Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

الجامعة الإسلامية

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH (Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)**

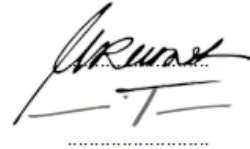
Disusun oleh : RIZKY BUDI TYASWARMAN

Nomor Mahasiswa : 18312269

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 15 Juli 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D.,
CFra.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Maulana, SE., S.Si., Ph.D., CFra, CertPSAS.



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Rizky Budi Tyaswarman

No. Mahasiswa: 18312269

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Penulis



(Rizky Budi Tyaswarman)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Rizky Budi Tyaswarman

No. Mahasiswa: 18312269

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15 Juni 2022

Dosen Pembimbing



(Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com. (SI). Ph. D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karuania-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020)**” dapat berjalan dengan baik. tak lupa shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan besar umat Muslim nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta sahabat beliau.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak dukungan, bantuan, serta bimbingan baik moral dan materil yang penulis terima sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama proses penyusunan skripsi
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudiman dan Ibu Hamidah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingannya selama ini. Serta saudari penulis, Nurul Winanda yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap pimpinan universitas.

4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Mahmudi, Dr. S.E., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta seluruh jajaran dosen, pegawai, dan *staff* Program Studi Akuntansi
7. Bapak Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(SI),Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan motivasi, semangat, kesabaran, ilmu, waktu, dan arahnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi dan seluruh staff keluarga besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman akuntansi UII angkatan 2018 yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan dan masih kurangnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dengan segala kerendahan hati untuk kritik dan saran yang dapat membangun demi menyempurnakan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Penulis



Rizky Budi Tyaswarman



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	11
2.2 Pengendalian Internal	12
2.2.1 Tujuan Pengendalian Internal	13
2.2.2 Kelemahan Pengendalian Internal.....	14
2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Kelemahan Pengendalian Internal 15	
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap KPI.....	15
2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi terhadap KPI.....	19
2.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah terhadap KPI.....	20
2.3.4 Belanja Modal terhadap KPI.....	21
2.3.5 Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap KPI.....	23
2.4 Penelitian Terdahulu.....	25

2.5	Pengembangan Hipotesis Terdahulu	30
2.5.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	30
2.5.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.....	31
2.5.3	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah.....	32
2.5.4	Pengaruh Belanja Modal	33
2.5.5	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah.....	34
2.6	Kerangka Penelitian	35
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....		37
3.1	Metodologi Penelitian	37
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	38
3.4.1	Variabel Dependen.....	39
3.4.2	Variabel Independen	39
3.4.3	Definisi Operasional Variabel.....	42
3.5	Metode Analisis Data	43
3.5.1	Alat Analisis Data	44
3.5.2	Metode Pengukuran	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	49
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.2	Deskripsi Sampel Penelitian	50
4.2.	Analisis Data	51
4.2.1	Statistik Deskriptif	51
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.4.	Hasil Pengujian Hipotesis	58
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi (<i>Godness of fit</i>).....	58
4.4.2	Uji t-test.....	59
4.5.	Pembahasan	61

4.5.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	61
4.5.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	62
4.5.3	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	63
4.5.4	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	64
4.5.5	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	65
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN		67
5.1	Simpulan.....	67
5.2	Kontribusi dan Implikasi Penelitian	68
5.2.1	Kontribusi.....	68
5.2.2	Implikasi Penelitian.....	69
5.3	Keterbatasan dan Saran Penelitian	70
5.3.1	Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3.2	Saran Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Belanja Modal dan Elemen Biayanya	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Operasional Variabel	42
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	49
Tabel 4.2 Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020 dan sesuai dengan kriteria sampel	50
Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.4 Uji Normalitas	53
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (Godness of Fit Test).....	59
Tabel 4.10 t-test.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	36
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Pengumpulan Data	75
Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen.....	76
Lampiran 3 Hasil Olah Data.....	79



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 10 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapatkan dari IHPS, BPK RI, BPS, dsb. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintahan daerah, belanja modal, dan kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020. Sedangkan variabel kompleksitas pemerintahan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020.

Kata Kunci: kelemahan pengendalian internal, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, kompleksitas Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the weaknesses of the internal control of district/city local governments in East Kalimantan Province 2018-2020. The sample selection was carried out by purposive sampling technique with the number of samples obtained in this study amounting to 10 districts/cities in East Kalimantan Province. The data obtained in the form of secondary data obtained from IHPS, BPK RI, BPS, etc. Data processing using the SPSS 25 application. The results in this study indicate that the variables of local revenue, economic growth, the size of local government, capital expenditure, and local government complexity have no effect on the weaknesses of internal control of district/city local governments in East Kalimantan Province 2018-2020. Meanwhile, the complexity of local government variables has a significant influence on the weakness of the internal control of district/city local governments in East Kalimantan Province 2018-2020.

Keywords: *internal control weakness, local revenue, economic growth, size of local government, capital expenditure, local government complexity.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan tindakan yang selaras untuk menjaga kekayaan organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan. Untuk mengadakan pengendalian internal yang baik dan akurat tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen seperti menyatukan pengecekan mendatar (*crossfooting*) dan penjumlahan menurun (*footing*). Pengendalian internal mencakup struktur organisasi dan seperangkat rangka dan alat terkoordinasi yang digunakan pada perusahaan untuk menjamin keamanan aset perusahaan, pembuktian keakuratan dan kebenaran data akuntansi, untuk meningkatkan efisiensi operasi dan untuk membantu memastikan dipatuhinya prosedur manajemen yang telah ditentukan (Maruta, 2015).

Sistem desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia saat ini mempunyai sejarah panjang dan berliku. Kondisi perubahan politik yang terjadi pada tahun 1990-an menjadi tonggak awal terjadinya arus balik dengan beberapa perubahan yang membawa dampak positif dalam Pemerintahan Indonesia. Di antara perubahan yang terjadi ada beberapa modifikasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih demokratis guna membuka peluang yang lebih besar bagi proses desentralisasi. Sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat juga perlahan mengalami perubahan dan penyesuaian dalam pemerintahan Indonesia.

Dalam perancangan sistem pengendalian internal daerah (SPI), Peraturan Pemerintah No. 60 merupakan patokan bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam merancang sistem pengendalian internal daerah (SPI). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan struktur pengendalian internal, dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah SPI titik-titik lemah yang dapat menimbulkan masalah dalam kegiatan pengendalian internal, maka dari itu dibentuknya sistem pengendalian internal (Nurwati, 2015).

Kelemahan SPI menurut BPK yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2018, 2019, dan 2020 biasanya diakibatkan oleh kelalaian pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan, tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajibannya, serta tidak seutuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang sah, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, lemahnya kegiatan pengawasan dan pengendalian, prosedur inventarisasi yang kurang memadai, dan lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan entri kurang lengkap atau tidak tepat. Misalnya, peralatan yang tidak ditampilkan di neraca/nilai aset di neraca berbeda dengan catatan pendukung.

Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI (2021) telah melakukan pemeriksaan kinerja selama semester I tahun 2020 yang meliputi 152 permasalahan ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan ketidakhematan senilai Rp 692,05 miliar dan 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 8,28 Triliun, serta 6.713 permasalahan kelemahan

pengendalian internal, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan potensi kerugian pada tahun 2020. Pada kasus-kasus tersebut BPK telah memberi masukan saran kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pejabat yang lalai dan suboptimal dalam kasus SPI, melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, menyetujui untuk menentukan biaya persediaan aktual dan melakukan uji tuntas persediaan secara teratur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (BPK RI, 2021).

Undang-undang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 No. 1 Pasal 56 ayat 4 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Pertumbuhan Pemerintah Daerah memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal karena setiap Pemerintah Daerah memiliki karakteristik yang berbeda (Puspitasari, 2013). Oleh karena itu, khususnya pada pengendalian internal Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur penting untuk mengetahui dampak tingkat pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah.

Agency Theory (AT) dan *Fraud Triangle Theory* (FTT) adalah beberapa teori yang telah banyak digunakan pada penelitian terdahulu terkait kelemahan pengendalian internal. Pada penelitian Rachmawati (2016); dan Puspitasari (2013) menggunakan teori AT. Pada penelitian Putri Agustina (2016); dan Martani dan Zaelani (2011) menggunakan teori FTT. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti akan menggunakan *Agency Theory* (AT) dengan pendapatan asli daerah

(PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah untuk menelaah mengenai dampak yang dihasilkan terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rentannya pengendalian internal Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian Martani dan Zaelani (2011) mengungkapkan jika kelemahan pengendalian internal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu bagi Saputro dan Mahmud (2014), kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan temuan dua penelitian tersebut, Suci (2021), Nurwati dan Trisnavati (2015), Puspitasari (2013) dan Hartono *et al.* (2014) menerangkan bahwa naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuncoro (2004) adalah ketika tingkat ekonomi yang dicapai pada periode sebelumnya lebih kecil dibandingkan tingkat ekonomi yang dicapai di periode sekarang sehingga mengalami peningkatan perekonomian. Di sisi lain Todaro (1995) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai prosedur berkelanjutan di mana daya muat produksi ekonomi meningkat dari waktu ke waktu untuk memperoleh tahap pendapatan nasional yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Hartono *et al.* (2014) dan Puspitasari (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian Martani

dan Zaelani (2011) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Ukuran adalah skala atau acuan untuk memahami seberapa kecil, sedang, atau besarnya suatu objek tertentu. Secara teoritis, dalam suatu pelaku ekonomi (sektor swasta), suatu perusahaan mengevaluasi ukurannya dari segi total aset/aktiva yang dimilikinya. Teorinya adalah kelemahan pengendalian internal akan semakin kecil jika skala suatu entitas semakin besar. Doyle *et al.* (2007) menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup dan cenderung lebih baik menerapkan pengendalian internal yang lebih baik. Sebaliknya dalam Nurwati dan Trisnawati (2015) menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran pemerintahan daerah. Dalam pengendalian internal, semakin besar pemerintah, semakin banyak kelemahan yang dimilikinya. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan semakin besar Pemerintah Daerah, semakin lemah pengelolaan dan pengawasannya, maka diperlukan pengendalian internal yang lebih tepat dan rinci.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mengumpulkan modal atau aset tetap untuk operasi sehari-hari suatu unit kerja atau dalam rangka melayani masyarakat. Menurut Suci (2021) dan Saputro dan Mahmud (2014), kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Di sisi lain, Nurwati dan Trisnawati (2015) menjelaskan bahwa belanja modal yang fluktuatif berdampak langsung terhadap kelemahan pengendalian internal. Dan menurut Rachmawati (2016) mengatakan bahwa kelemahan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Kompleksitas Pemerintah Daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Puspitasari (2013) dan Hartono *et al.* (2014) menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal dipengaruhi oleh kompleksitas Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masing-masing jumlah SKPD dan kecamatan. Martani dan Zaelani (2012) tentang hubungan antara kompleksitas dan kelemahan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan negatif. Di sisi lain, pengkajian oleh Saputro (2014) dan Putri (2015) tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Dalam penelitian ini, berdasarkan sejumlah permasalahan yang terkait kelemahan pengendalian internal serta perbedaan kinerja dan output penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas, maka penelitian ini merujuk pada jurnal yang ditulis (Mustikasari, 2021), yang berjudul pengaruh ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2016-2018.

Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya beberapa variabel independen tersebut, berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian kembali serta menambahkan satu variabel independensi yaitu kompleksitas daerah yang diukur dengan jumlah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan jumlah keseluruhan SKPD sebagai patokan pengukuran, maka tingkat kebutuhan pelayanan publik di daerah tersebut harus diperhitungkan. Semakin kompleks dan beragam suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, semakin sulit untuk melakukan pengendalian internal. Suatu badan organisasi akan menemui

agitasi yang lebih menantang dalam menerapkan pengendalian internal secara teratur untuk setiap unit bisnis individu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintahan Daerah?
3. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah?
5. Apakah Kompleksitas Pemerintah Daerah (SKPD Provinsi Kalimantan Timur) berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman makna dan interpretasi diperlukannya membatasi masalah penelitian ini. Fokus dari penelitian ini mengulas mengenai berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah di antaranya adalah pendapatan asli

daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, kompleksitas SKPD di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.
2. Menguji secara empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian Pemerintah Daerah.
3. Menguji secara empiris pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah
4. Menguji secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.
5. Menguji secara empiris pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah (SKPD Provinsi Kalimantan Timur) terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi pada wacana teoritis yang berhubungan dengan apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta diharapkan dapat

penelitian ini menghasilkan wawasan mengenai kualitas pengendalian internal Pemerintah Daerah sehingga bisa diimplementasikan dalam teori dan maupun praktik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam ranah praktis terhadap Pemerintah Daerah dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan dan evaluasi terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

- a. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pemahaman akan pentingnya pengendalian internal dan sebagai peninjauan dalam penyusunan kebijakan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat membantu penelitian lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori, kajian pustaka, uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji, serta kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dirasakan oleh peneliti, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Agency Theory*) berfokus pada hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan membahas tentang hubungan keagenan di mana satu pihak (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan tersebut. Teori keagenan menegaskan bahwa agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka (Tricker, 1984). Di sisi lain, Puspitasari (2013) berpendapat bahwa fungsi pengawasan dan manajerial dapat mengatasi masalah sistem pengambilan keputusan oleh keagenan. Hal-hal yang dapat menimbulkan pertikaian kepentingan antara kelompok-kelompok keagenan adalah seperti diferensiasi fungsi manajemen yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan dari fungsi kontrol yang menyetujui dan memantau keputusan penting dalam organisasi (Puspitasari, 2013).

Purniasari (2016) menyatakan bahwa demokrasi modern yang terdapat pada organisasi publik dapat diterapkan dengan serangkaian hubungan prinsipal-agen sebagai dasar teori keagenan. Teori keagenan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan bertindak sepenuhnya menyadari kepentingannya sebagai agen (prinsipal) masyarakat, dan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Teori keagenan mengasumsikan bahwa ada *information asymmetry* yang besar antara agen (pemerintah) dan subjek (masyarakat) yang memiliki akses langsung ke informasi yang dibutuhkan. Adanya *information asymmetry* menguatkan terjadinya korupsi atau kecurangan agen. Oleh

karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pengendalian internal sebagai mekanisme *check and balance* untuk mengurangi *information asymmetry*. Menurut teori keagenan, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diawasi agar dilaksanakan secara penuh sesuai dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah, informasi yang diterima warga lebih seimbang dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, dan *information asymmetry* dapat dikurangi.

2.2 Pengendalian Internal

Ikatan Akuntan Indonesia (2016), mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan pengurus, manajemen, dan staff lain dari entitas, yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang tepat untuk tiga kelas berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengendalian internal adalah definisi yang berlaku untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi sebagai organisasi atau perusahaan yang tidak diinginkan, karena mereka memiliki pembatasan pada organisasi atau perusahaan dalam mengelola semua proses bisnis. Risiko ini tidak dapat menerima atau mengakses data, seperti karyawan atau pengguna, seperti penggunaan data yang salah yang tidak dapat mengakses data tersebut.

Keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum merupakan tujuan pengendalian internal untuk memberikan kepastian yang wajar yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan pimpinan

yang berada di bawah mereka dan juga sebagai arti dari pengendalian internal itu sendiri (Arens *et al.* 2014).

Berdasarkan beberapa definisi pengendalian internal di atas, dapat ditarik kesimpulan jika pengendalian internal adalah proses yang berdasarkan dari aturan-aturan dan prosedur yang dirancang dan harus diikuti oleh orang-orang untuk menyerahkan informasi yang tepat kepada pengguna guna memastikan tercapainya ambisi tertentu yang saling terkait. Implementasi pengendalian internal dalam suatu bisnis bertujuan untuk dapat meminimalisir jumlah kegiatan kecurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merugikan perusahaan, seperti pencurian.

2.2.1 Tujuan Pengendalian Internal

Demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, organisasi atau lembaga harus mengontrol pelaksanaan kegiatan publik. Pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan sesuai dengan Pasal 21 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Arens *et al.* (2014), tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

Karena informasi yang akurat diperlukan untuk menjalankan aktivitas bisnis, data yang andal diharapkan karena laporan keuangan yang andal hanya dapat disiapkan jika data atau catatan yang andal tersedia saat pengendalian internal diterapkan.

2. Efisiensi dan efektifitas operasi

Untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif dalam suatu bisnis, pengendalian internal dapat diterapkan untuk menghindari duplikasi usaha atau pemborosan sumber daya yang tidak menguntungkan.

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku

Untuk mencapai ambisi perusahaan, tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa karyawan perusahaan mematuhi semua aturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh manajemen.

2.2.2 Kelemahan Pengendalian Internal

Kelemahan pengendalian internal dapat dilihat pada tajuk kepatuhan pengendalian internal terhadap standar audit yang telah diterapkan, yaitu standar audit nasional (Warren, 2003). Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah lembaga publik yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga publik. Pengendalian internal Pemerintah Daerah telah melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dapat menggunakan hasil audit BPK sebagai indikator penilaian. Kelemahan pengendalian internal dirancang oleh BPK melalui tiga perspektif yaitu (1) kelemahan pada kerangka pengendalian internal; (2) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; dan (3) kelemahan sistem pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Standar Audit Nomor 2, komplikasi pengendalian internal dibedakan menjadi tiga jenis yaitu kekurangan pengendalian, kekurangan yang

signifikan, dan kelemahan material. Kelemahan material adalah kekurangan material, atau campuran dari kekurangan material, yang mengakibatkan kesalahan kutipan material dari rencana keuangan tahunan yang tidak dapat dihindari atau dikenali. Kekurangan signifikan adalah kurangnya pengendalian atau kombinasi kelemahan pengendalian yang memengaruhi kapasitas elemen untuk mengungkapkan, mendukung, merekam, memproses siklus atau melaporkan informasi moneter luar yang dapat diandalkan sesuai standar akuntansi yang benar, misalnya: Salah saji laporan keuangan tahunan atau interim perusahaan yang dicegah atau tidak dapat dibedakan. Kekurangan pengendalian terjadi dengan alasan bahwa rencana atau kegiatan pengendalian, dewan atau perwakilan mengabaikan untuk melaksanakan peran yang diharapkan dalam bisnis yang khas untuk mencegah atau mengenali kesalahan secepat mungkin.

2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Kelemahan Pengendalian Internal

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap KPI

Menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, retribusi daerah, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut undang-undang no. 34 Tahun 2006 berisi perubahan atas UU no. 18 tahun 1997 adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan yang berimbang

yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah. Demikian juga dengan pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan daerah (anggaran) dan alat ukur (pengatur). Menurut Mardiasmo (2011), beberapa definisi atau istilah yang berkaitan dengan pajak daerah adalah:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan hukum masyarakat yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan adalah sekelompok orang dan/ atau modal yang merupakan suatu kesatuan yang melakukan atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perusahaan lain, perusahaan publik (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD) dengan nama dan berbentuk badan hukum. Setiap perusahaan, koperasi, dana pensiun, yayasan, kongsi, persekutuan umum, perkumpulan, organisasi sosial politik, organisasi massa atau organisasi lain, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk konvensi skema investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

kewajiban dan hak perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan setempat.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu penerimaan PAD yang mengambil porsi cukup besar setelah retribusi daerah dan pajak. Pembentukan BUMD bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan lain yang termasuk hasil pengelolaan aset daerah antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

c. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011), pengertian retribusi daerah adalah pajak daerah melalui pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Sedangkan menurut undang-undang no. 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pajak daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian wewenang tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Subjek retribusi daerah menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.

d. Sumber Pendapatan Daerah Lain yang Sah

Hasil usaha daerah lainnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikecualikan dari kategori pajak dan retribusi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sumber pendapatan daerah lain yang sah adalah pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dapat dipisahkan seperti pendapatan bunga dan komisi, jasa giro, potongan atau bentuk lain yang mengikuti kesepakatan dan tambahan pembelian produk. Sementara itu pendapatan lain yang sah meliputi penerimaan penghargaan, subsidi krisis yang merupakan cadangan APBN yang diberikan kepada daerah-daerah yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak biasa dan juga keadaan darurat yang dapat dibubarkan, aset pembagian pendapatan tugas bersama, cadangan penyesuaian, bencana publik, kemandirian pemerintah yang unik, bantuan keuangan dari daerah. (BPS Kaltim, 2020).

Rumus pengukuran PAD dalam penelitian ini berupa:

$$\text{PAD} = \text{Ln} (\text{HDP} + \text{HRD} + \text{HPKH} + \text{LPS})$$

HPD = Hasil Pajak Daerah

HRD = Hasil Retribusi Daerah

HPKH = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPS = Lain-lain PAD yang Sah

2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi terhadap KPI

Sukirno (1996) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), yang menunjukkan apakah peningkatan tersebut baik atau memburuk dari laju pertumbuhan penduduk, atau berlakunya perubahan struktur ekonomi. Dan menurut Sularno (2013), suatu negara yang menuju ke keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu secara terus menerus adalah proses pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan peningkatan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan meningkat dengan asumsi tindakan moneter yang dicapai saat ini lebih besar dari tingkat yang dicapai sebelumnya. Hartono *et al.* (2014) mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu target terpenting yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menemukan cara untuk memilah dan menyelesaikan masalah perekonomian dengan baik.

Terdapat dua cara untuk memastikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto): strategi *direct* dan strategi *indirect*. Strategi *direct* merupakan strategi estimasi yang memanfaatkan informasi yang didapat dari informasi fundamental untuk setiap kabupaten/kota. Strategi *direct* dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Dan untuk dapat menghitung PDRB jika tidak dapat menggunakan strategi *direct*, maka strategi *indirect* dapat digunakan

untuk menyalurkan PDRB provinsi ke tingkat lokal yang lebih kecil (Hartono *et al.* 2014).

2.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah terhadap KPI

Ukuran merupakan suatu tolak ukur atau acuan buat mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu benda tertentu. Secara teori, dalam sebuah badan usaha (sektor swasta), menggunakan total aset/aktiva untuk mengevaluasi ukuran yang dimilikinya. Teori ini mengatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin sedikit kelemahan pengendalian internalnya. Doyle *et al.* (2007) mengungkapkan perusahaan besar cenderung lebih sanggup menerapkan pengendalian internal yang tepat karena mereka memiliki sumber daya yang cukup. Perusahaan dengan total aset yang besar mengartikan arus kas perusahaan tersebut telah mencapai keadaan positif dan telah mencapai tahap kedewasaan yang dinilai memiliki peluang yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa total jumlah penduduk merupakan variabel yang menentukan kebutuhan suatu daerah akan pendanaan untuk pengambilan keputusan kebijakan demi melayani penduduk daerah tersebut. Jumlah penduduk yang besar di suatu kabupaten/kota dapat mencerminkan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat ke tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Persyaratan anggaran untuk Pemerintah Daerah dan/atau daerah dapat berbeda. Seperti, provinsi atau daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi tidak mendapatkan jumlah anggaran yang sama, meskipun jumlah penduduknya sedikit.

Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin besar pula dana yang digunakan untuk administrasi publik dan semakin kompleks pula isu-isu yang muncul di dekatnya. Pemerintah Daerah dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan pengendalian internal sebagai jenis tanggungjawab kepada masyarakat publik. Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka akan semakin memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah tersebut.

2.3.4 Belanja Modal terhadap KPI

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010, pengertian belanja modal adalah konsumsi rencana pengeluaran untuk mengamankan sumber daya tetap dan sumber daya berbeda yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode pembukuan sebagai ciri pengembangan modal yang terdiri dari perluasan sumber aktiva tetap yang memberikan keuntungan lebih, termasuk penggunaan untuk mendukung biaya yang harus mengikuti atau meningkatkan keberadaan organisasi, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya.

Belanja modal merupakan bagian penggunaan langsung dari rencana pengeluaran publik yang menciptakan hasil sebagai sumber daya tetap. Dalam pemanfaatan sumber daya tetap yang disampaikan ada yang bersentuhan langsung dengan administrasi publik atau dimanfaatkan oleh daerah (seperti perancah, jalan, trotoar, arena, struktur olahraga, kereta api, rambu lalu lintas dan halte transportasi) dan ada juga yang tidak langsung dimanfaatkan oleh daerah setempat (seperti tempat usaha pemerintah). Dari sisi kebijakan publik, sebagian besar belanja modal

terkait dengan pelayanan publik, sehingga jumlah perencanaan pengeluaran harus relatif besar setiap tahunnya. Meski demikian, belanja modal tidak selalu secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Secara teori, ada beberapa cara untuk memperoleh aset tetap tersebut seperti konstruksi sendiri, pertukaran dengan aset tetap lain dan pembelian. Meskipun demikian, otoritas publik sebagian besar melakukan ini melalui pembelian. Tabel 2.1 menyajikan elemen biaya yang termasuk dalam belanja modal.

Tabel 2. 1 Jenis Belanja Modal dan Elemen Biayanya

Jenis Belanja Modal	Elemen Biaya yang Termasuk Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembebasan Tanah b) Pembuatan Sertifikat Tanah c) Biaya Pengukuran Tanah d) Perjalanan Pengadaan Tanah e) Pembayaran Honor Tim Tanah f) Pengurangan dan Pematangan Tanah
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> a) Bahan Baku Jalan dan Jembatan b) Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan c) Upah Tenaga Kerja dan Honor d) Perizinan Jalan dan Jembatan e) Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan f) Bahan Baku Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Bahan Baku Gedung dan Bangunan b) Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan c) Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan d) Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan e) Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan f) Perizinan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> a) Bahan Baku Peralatan dan Mesin b) Sewa Peralatan dan Mesin c) Perencanaan dan Perawatan Peralatan dan Mesin d) Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin e) Perizinan Peralatan dan Mesin f) Pemasangan Peralatan dan Mesin g) Perjalanan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Fisik Lainnya	a) Bahan Baku Fisik Lainnya b) Sewa Peralatan Fisik Lainnya c) Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya d) Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya e) Jasa Konsultan Fisik Lainnya f) Perizinan Fisik Lainnya
-----------------------------	---

2.3.5 Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap KPI

Kompleksitas suatu daerah merupakan salah satu variabel yang memengaruhi pengendalian internal. Kompleksitas adalah tingkat strata suatu organisasi, termasuk tingkat pembagian kerja atau spesialisasi, jumlah tingkat dalam sistem progresif otoritatif, dan sebesar apa unit organisasi secara geologis tersebar untuk mencapai tujuannya (Hartono *et al.* 2014). Semakin kompleks kegiatan di suatu wilayah dan juga luas cakupan pekerjaan, semakin sulit untuk menerapkan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian Rachmawati (2016), terdapat berbagai metrik untuk menentukan kompleksitas kawasan, antara lain total SKPD, total penduduk dan total kecamatan. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total keseluruhan kecamatan untuk mengukur kompleksitas daerah. Jika terdapat banyak kecamatan di suatu daerah, diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam penerapan sistem pengendalian internal seperti masalah dalam pemantauan Pemerintah Daerah dan masalah dalam pelaporan laporan keuangan.

Kompleksitas daerah merupakan tingkat pembedaan pada suatu daerah yang dapat memicu bentrokan yang berakibat menghambat pencapaian tujuan suatu daerah bagi kesejahteraan rakyatnya (Hartono *et al.* 2014). Pemerintah Daerah

kecamatan terkait dengan total unit dalam entitas atau cabang institusi sangat berkaitan dengan perkara yang diketahui muncul dari sejumlah kecamatan, misalnya, kesulitan dalam penerapan sistem pengendalian internal dari masalah kontrol oleh otoritas lokal hingga saat penyampaian laporan keuangan.



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
1	Rachmawati (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Daerah (KD) • Pertumbuhan Ekonomi (PE) • Belanja Modal (BM) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KPIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Data sekunder IHPS BPK RI, PDRB, dan LKPD • Pengujian Data Outliner • <i>Agency Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • PE => KPIP (didukung) • PAD => KPIP (tidak didukung) • KD => KPIP (tidak didukung) • BM => KPIP (tidak didukung)
2	Martani dan Zaelani (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) • Pertumbuhan Ekonomi (PE) • Kompleksitas Pemerintah Daerah (KPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KPIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 255 pemerintah kab/kota • SPSS • <i>Fraud Triangle Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • UPD => KPIP (tidak didukung) • PE => KPIP (didukung) • KPD => KPIP (tidak didukung)
3	Saputro (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) • Belanja Modal (BM) • Kompleksitas Daerah (KD) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KPIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 41 responden mahasiswa aktif jurusan akuntansi S1 • <i>One Way ANOVA</i> dan <i>Two Way ANOVA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • UPD => KPIP (tidak didukung) • KPD => KPIP (tidak didukung) • BM => KPIP (tidak didukung) • PAD => KPIP (tidak didukung)

didukung)

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
4	Putri (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Resiko (PR) • Pengaruh Aktifitas Pengendalian (PAP) • Pengaruh Informasi dan Komunikasi (PIK) • Lingkungan Pengendalian (LP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KIPID) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data primer • 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Surabaya • Analisis Regresi Linier Berganda • <i>Fraud Triangle Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • PR => KIPID (tidak didukung) • PAP => KIPID (didukung) • PIK => KIPID (tidak didukung) • LP => KIPID (tidak didukung)
5	Nurwati (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) • Pertumbuhan Ekonomi (PE) • Belanja Modal (BM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KIPID) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • 35 kabupaten dan kota • Sampel jenuh • Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • UPD => KIPID (tidak didukung) • PE => KIPID (tidak didukung) • PAD => KIPID (didukung) • BM => KIPID (didukung)
6	Samhah (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal (BM) • Pertumbuhan Ekonomi (PE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Data sekunder • 38 pemerintah jawa 	<ul style="list-style-type: none"> • PE => KIPID (didukung) • PAD => KIPID (didukung) • BM => (tidak didukung)

		• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pemerintah Daerah	timur	
--	--	--------------------------------	-------------------	-------	--

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
7	Suci (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal (BM) • Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Data Sekunder LKPD • Sampel kab/kota di Bali • SPSS 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD => KPIP (tidak didukung) • UPD => KPIP (didukung) • BM => KPIP (didukung)
8	Mustikasari (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Pemerintah Daerah (KPD) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) • Belanja Modal (BM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Data sekunder • <i>Purposif sampling</i> 30 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> • UPD => KPIP (tidak didukung) • PAD => KPIP (didukung) • BM => KPIP (tidak didukung) • KPD => KPIP (didukung)
9	Puspitasari (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi (PE) • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Kompleksitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (KPIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kausalitas • Data sekunder BPK RI • Sampel Pemerintah Daerah total 156 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • PE => KPIP (didukung) • PAD => KPIP (didukung) • KPD => KPIP (didukung)

		Pemerintah Daerah (KPD)		<ul style="list-style-type: none">• Regresi berganda• <i>Agency Theory</i>	
--	--	-------------------------	--	---	--



Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan menemukan berbagai macam variabel di antaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah. Mayoritas penelitian terdahulu yang telah disebutkan menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diambil melalui data sekunder seperti data Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), data jumlah kecamatan, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampel yang digunakan pun rata-rata adalah kabupaten/kota Pemerintah Daerah di Indonesia. Alat uji yang digunakan juga cukup beragam seperti SPSS, *Multiple Regression OLS*, dan ANOVA. Penelitian-penelitian tersebut mendukung variabelnya dengan beberapa teori seperti *Agency Theory* dan *Fraud Triangle Theory*.

Hasil yang diperoleh pun beragam. Secara keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah (Puspitasari, 2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Risnawati dan Nurwati, 2015), Belanja Modal (Rachmawati, 2016), Kompleksitas Pemerintah Daerah (Putri Agustina, 2016), dan Ukuran Pemerintah Daerah (Martani, 2015).

2.5 Pengembangan Hipotesis Terdahulu

Hipotesis adalah spekulasi atau jawaban sementara atas masalah yang kebenarannya dibuktikan dengan menganalisis data yang relevan. Validitas asumsi awal akan terlihat setelah investigasi dilakukan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah Kalimantan Timur.

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah pada umumnya tidak memiliki pemasukan yang besar pada setiap transaksinya, namun frekuensi transaksinya sangat tinggi, termasuk pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan retribusi daerah. Semakin tinggi pendapatan di daerah, semakin besar masalah pengendalian internal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, retribusi daerah, pajak daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pemerintah dengan PAD yang tinggi memiliki lebih banyak kelemahan pengendalian internal (Martani dan Zaelani, 2015). PAD berdampak cukup besar terhadap kelemahan pengendalian internal. Ini terjadi karena PAD (hasil pajak daerah, biaya tambahan, dan pengelolaan aset daerah secara individu) dikelola secara bebas oleh Pemerintah Daerah dan dana ini dapat disalahgunakan.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian seperti berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian Pemerintah Daerah.

2.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan terpenting yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil mengatur dan melaksanakan usaha ekonomi dengan baik (Hartono *et al.* 2014). Menurut Martani dan Zaelani (2011), pertumbuhan ekonomi mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah dari satu periode ke periode lainnya. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila tingkat usaha ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan perusahaan pada sektor swasta memiliki hubungan positif dengan permasalahan kelemahan pengendalian internal serta banyak membawa perubahan pada organisasi tersebut (Rachmawati, 2016). Perubahan ini memerlukan penyesuaian pengendalian internal mereka sendiri. Dengan pesatnya peningkatan aktivitas bisnis, perusahaan cenderung tidak memiliki pengendalian internal yang memadai. Pada Pemerintah Daerah, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari besar kecilnya produk domestik bruto daerah.

Berdasarkan konsep teori dari penelitian terdahulu diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah

Sumber aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat mewakili ukuran Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang masuk dalam kategori organisasi nirlaba. Kegiatan ekonomi daerah dapat didukung jika pemerintah daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya yang mumpuni. Namun dengan banyaknya aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah belum dapat diakui sebagai aset dengan standar yang berlaku dengan kemampuan yang memadai, sehingga semua aset milik pemerintah dapat diringkas dengan baik. Pengendalian internal aset yang tepat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan aset. Larassati *et al.* (2013) menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah memiliki dampak yang cukup besar terhadap lemahnya pengendalian internal. Dalam studi lain, ukuran kotamadya diukur dengan menggunakan sumber daya keseluruhan sebagai pengganti ukuran Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah saat mendistribusikan anggaran untuk kepentingan organisasi menggunakan total asset sebagai ukuran karena dapat menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah. Suci (2021) menemukan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh cukup besar terhadap kelemahan pengendalian internal. Dalam studi ini, ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan jumlah penduduk dikarenakan kebijakan pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat terlihat lebih jelas dengan perbedaan jumlah penduduk antar wilayah yang besar maupun yang kecil dengan perbedaan dana yang dibutuhkan daerah-daerah tersebut juga berbeda.

Berdasarkan pembahasan yang disajikan, maka dihasilkan rumusan hipotesis penelitian seperti berikut:

H3: Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

2.5.4 Pengaruh Belanja Modal

Menurut Mulyadi (2007), keuangan pemerintah harus digunakan dengan baik dan sah untuk mencapai tujuan nasional yang berkaitan dengan rasa keadilan dan martabat, harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab. Teori-teori ini sejalan dengan teori-teori yang dikenal sebelumnya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kekuasaan untuk mengontrol keuangan pemerintah selalu berisiko tinggi terhadap penipuan. Menurut Sahari dan Kurniawan (2007), salah satu penyebab terjadinya fraud adalah peluang. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelemahan dalam pengendalian internal. Oleh karena itu, pengendalian internal investigatif atas belanja pemerintah sangat dibutuhkan, karena tidak efisiennya pengadaan barang dan jasa, terutama belanja modal, bahkan sering terjadi korupsi.

Hal ini terbukti oleh beberapa penelitian seperti penelitian oleh Mauro (2014) yang mengatakan bahwa kecurangan lebih mudah dilakukan dalam perencanaan pengeluaran tahunan, yang mempermudah terjadinya markup, suap dan dapat mengakibatkan aktivitas tersebut tidak terlacak. Menurut Suci (2021), belanja modal memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Semakin besar perencanaan pengeluaran tahunan investasi yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, semakin banyak pula investasi yang akan disalahgunakan sebagai sasaran kecurangan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

2.5.5 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas wilayah tercermin dari total Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), total kelurahan, dan total penduduk di wilayah tersebut. Total SKPD dan total kelurahan dalam mengukur kompleksitas dibandingkan dengan sub-Pemerintah Daerah. Semakin banyak jumlah SKPD dan kelurahan dalam suatu daerah, maka semakin kompleks daerah tersebut. Kompleksitas dalam hal ini terkait dengan pengawasan Pemerintah Daerah saat melaporkan laporan keuangan daerah dan penyatuan laporan keuangan. Serta totalan penduduk dapat menjadi salah satu poin dalam mengukur kompleksitas daerah. Jumlah penduduk juga menunjukkan besarnya kewajiban pelayanan yang harus diberikan dari pemerintah daerah kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Semakin kompleks suatu organisasi menjalankan aktivitasnya dan semakin tersebar wilayah kerjanya, semakin sulit untuk menegakkan pengendalian internal. Dalam menerapkan pengendalian internal yang teratur untuk masing-masing departemen yang ada, organisasi menghadapi agitasi yang lebih besar. Masalah juga terjadi saat memulai mengintegrasikan akun dari berbagai departemen atau cabang di organisasi. Hartono *et al.* (2014) dan Puspitasari (2013) menemukan pengaruh hubungan yang cukup berdampak antara kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah. Doyle *et al.* (2007) juga

menemukan hubungan positif antara jumlah unit bisnis atau kantor cabang dari suatu organisasi yang memiliki kelemahan dalam pengendalian internal.

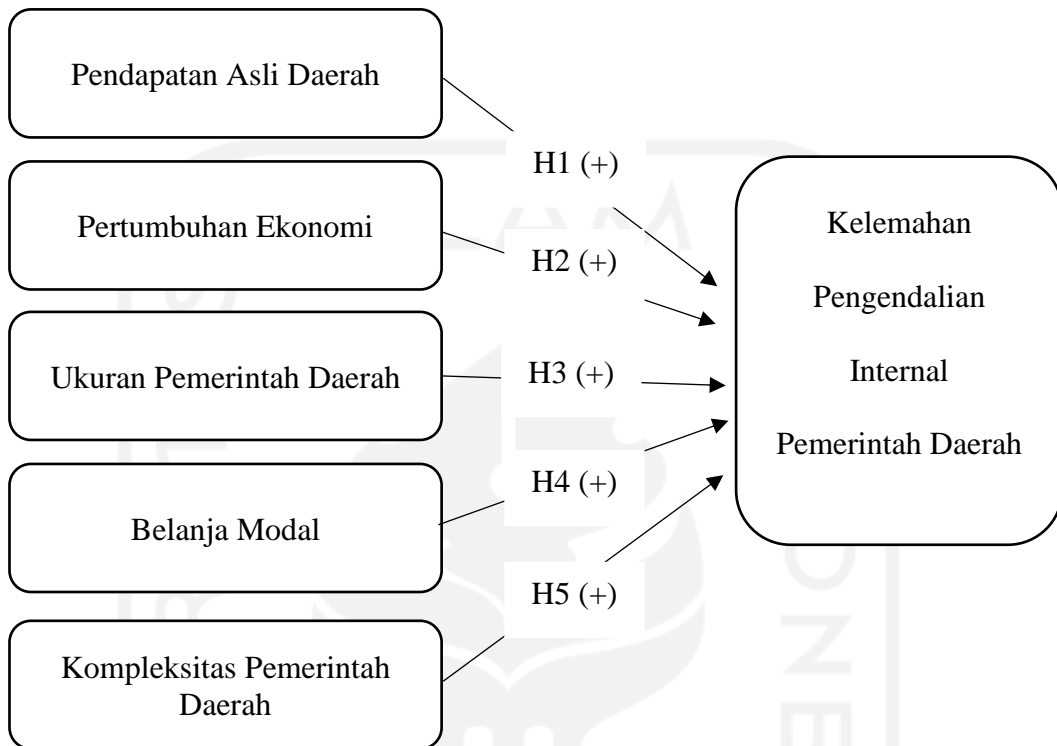
SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai pembanding untuk mengukur kompleksitas Pemerintah Daerah. Hal ini karena ditengarai banyaknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan menimbulkan banyak masalah seperti sulitnya menerapkan sistem pengendalian internal di berbagai lingkungan SKPD, masalah pengawasan kota, dan masalah pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang disajikan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif pada kelemahan pengendalian internal.

2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibuatlah ilustrasi seperti Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian ini bersifat objektif, induktif, dan ilmiah di mana data yang diambil berupa nilai numerik (nilai, skor) atau ungkapan-ungkapan yang dievaluasi. Hasil penelitian ditentukan dengan menggunakan analisis statistik.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek-objek atau subjek-subjek yang menunjukkan sifat karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diselidiki, dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 7 kabupaten dan 3 kota pada tahun 2018-2020. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik yang tidak berbeda jauh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni metode pengujian untuk menentukan sampel dengan menjelaskan mengapa orang-orang tertentu dipindai dan mengapa latar belakang tertentu diamati (Ahyar, 2020). Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai sampel adalah:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki realisasi APBD pada Tahun 2018-2020 dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengeluarkan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang di terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minimal 3 tahun mengalami pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2018-2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data karena data diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Dokumentasi dari sumber sekunder merupakan metode pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data yang diambil dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikelola dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), BPK RI, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2020. Data yang diolah berupa: Pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan konsep yang memiliki variabilitas. Sedangkan konsep merupakan penggambaran atau abstraksi berdasarkan suatu kenyataan tertentu. Konsep yang berupa apapun, memiliki karakteristik yang bervariasi, maka bisa diklaim menjadi variable. Dengan demikian, variable bisa diartikan menjadi segala sesuatu yg bervariasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel yang memengaruhi atau memicu perubahan atau munculnya variabel dependen/terikat (Ahyar, 2020). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lemahnya pengendalian internal dalam pelaporan keuangan tercermin dari beberapa aspek seperti kelemahan pelaporan dan sistem pengendalian akuntansi, kelemahan struktur pengendalian internal, dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan. Kemudian parameter ini diukur dengan menjumlahkan temuan kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah yang tertuang dalam IHPS yang dikeluarkan oleh BPK RI. Semakin lemah pengendalian internal Pemerintah Daerah, maka Semakin banyak kasus SPI yang menyimpang ditemukan di Pemerintah Daerah (Martani dan Zaelani, 2011).

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memberikan dampak atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen (Ahyar, 2020). Adapun variabel-variabelnya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari sumber-sumber di wilayah tertentu. Semakin tinggi peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. (Carunia, 2017). Pengukuran PAD untuk penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = $LPS + HPKH + HRD + HPD$

LPS = Lain-lain PAD yang Sah

HPKH = Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

HRD = Hasil Retribusi Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terlepas dari apakah peningkatan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk daerah, atau terdapat perubahan struktur ekonomi (Puspitasari, 2013). Produk Domestik Regional Bruto adalah hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB t - PDRB t_0}{PDRB t_0} \times 100\%$$

PDRB t = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun sekarang

PDRB t₀ = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun lalu

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah dalam penelitian ini menunjukkan gambaran ukuran atau skala besar kecilnya Pemerintah Daerah. Total keseluruhan penduduk Pemerintah Daerah adalah indikator untuk variabel ini. Besar kecilnya Pemerintah Daerah menunjukkan ukuran organisasi tersebut (Larassati *et al.* 2013). Ukuran entitas dapat digunakan sebagai gambaran universal yang dapat dilihat secara fisik di luar organisasi. Untuk dapat menarik investor menanamkan modalnya ke dalam perusahaan, pada umumnya organisasi harus memiliki aset/aktiva yang besar pula. Perusahaan besar relatif stabil dalam hal tingkat

keuangan dibandingkan dengan UKM. Dengan adanya sumber daya yang lebih mencukupi dan berkualitas, kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada organisasi besar cenderung lebih rendah.

4. Belanja Modal

Belanja modal dikategorikan ke dalam belanja tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan belanja fisik lainnya. Aktiva tetap merupakan hasil dari anggaran otoritas pemerintah dari komponen belanja modal secara langsung (DJPk, 2020). Oleh karena itu, ukuran belanja modal diukur dengan mentotalkan jenis-jenis belanja modal tersebut. Pengukuran belanja modal diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Belanja Modal} = Ln (BMT + BMJIJ + BMGB + BMPM + BMFL)$$

BMT	= Belanja Modal Tanah
BMJIJ	= Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
BMGB	= Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BMPM	= Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BMFL	= Belanja Modal Fisik Lainnya

5. Kompleksitas Pemerintah Daerah

Dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat, kompleksitas Pemerintah Daerah merupakan salah satu pembeda yang ada pada pemerintah daerah dan dapat menimbulkan konflik dan permasalahan yang tidak diinginkan (Puspitasari, 2013). Restu dan Indriantoro (2000) mengatakan bahwa banyaknya unit perangkat daerah yang terdapat di daerah tersebut adalah kompleksitas itu sendiri. Variabel kompleksitas daerah dalam penelitian ini berasal dari total keseluruhan SKPD Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Kalimantan Timur.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang terdiri dari faktor-faktor yang diduga memengaruhi kelemahan pengendalian internal dengan menggunakan nilai numerik sebagai indikator permasalahan penelitian. Dan hal ini dirangkum dan disajikan seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran / Indikator
1	Kelemahan Pengendalian Internal (Dependen)	Kurangnya manajemen yang tepat dapat meningkatkan risiko salah saji laporan keuangan (Puspitasari, 2013)	Jumlah temuan kasus BPK atas kelemahan sistem pengendalian internal
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Independen)	Pendapatan daerah yang berasal berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. (Martani dan Zaelani, 2011)	$Ln (HPD + RD + PLPD + LPS)$
3	Pertumbuhan Ekonomi (Independen)	PDRB/PDB meningkat tanpa memperhatikan apakah kenaikannya lebih besar atau kecil dibanding dengan pertumbuhan penduduk. (Martani, 2011)	$\frac{PDRB t - PDRB t0}{PDRB t0}$
4	Ukuran Pemerintah Daerah (Independen)	Dapat Menjelaskan besar kecilnya skala ekonomi suatu Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintah Daerah dapat diukur dengan jumlah penduduk yang dimiliki pemerintahan tersebut.	Ukuran Pemerintah Daerah = Jumlah Penduduk

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi	Pengukuran/ Indikator
5	Belanja Modal (Independen)	Rencana pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya yang dalam satu periode akuntansi bermanfaat lebih. (Risnawati dan Nurwati, 2015)	Jumlah Belanja Modal ditotalkan
6	Kompleksitas Pemerintah Daerah (Independen)	Tingkatan diferensiasi Pemerintah Daerah yang menimbulkan konflik dan permasalahan untuk mencapai tujuannya. (Puspitasari, 2013)	Jumlah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi Kalimantan Timur

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan program aplikasi SPSS 25. Untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara umum, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan untuk pengujian hipotesis peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisa data dari dua atau lebih variabel penelitian dapat menggunakan analisis regresi berganda (Ahyar, 2020). Uji asumsi klasik harus terlebih dahulu dilakukan sebelum menggunakan analisis regresi dalam uji hipotesis. Model regresi berganda dianggap layak jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data.

3.5.1 Alat Analisis Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan data sekunder yang dikelola dari PDRB, APBD, LKPD, BPS, BPK RI, dan lain-lain yang bersangkutan dengan variabel-variabel yang memengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan output berupa informasi yang dibutuhkan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian. Terdapat enam variabel yang akan diuji pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah.

3.5.2 Metode Pengukuran

3.5.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam menemukan dan menjelaskan variabel-variabel yang diselidiki dalam bentuk numerik sebagai dasar pengambilan keputusan, analisis deskriptif adalah analisis data yang dapat dilakukan (Ikhsan, 2013). Nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi adalah angka-angka yang dirujuk dalam pengukuran statistik deskriptif (Ghozali, 2017). Nilai maksimum digunakan untuk menemukan kumpulan data terbesar yang dapat dipertimbangkan dalam varian. Nilai minimum digunakan untuk menemukan jumlah terkecil dari rata-rata varian. Standar deviasi digunakan untuk menentukan seberapa berbeda data yang relevan dari mean. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang sampel yang dikumpulkan dan untuk memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang harus dilakukan sebelum uji analisis regresi linear berganda yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas model regresi bertujuan untuk menguji apakah sebaran data sampel yang dipakai berdistribusi normal. Distribusi data yang normal atau mendekati normal merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2017). Uji normalitas untuk penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS), suatu statistik non-parametrik dengan nilai signifikansi 0,05 dan analisis statistik normalitas data.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan model regresi ke pengamatan model regresi lainnya. Heteroskedastisitas dapat terjadi disebabkan oleh perubahan keadaan yang tidak dijelaskan dalam model regresi dan distribusi titik-titik data populasi pada grafik bidang regresi tidak lurus/teratur. Jika tidak terjadi penyimpangan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, maka itu adalah homoskedastisitas, dan jika berbeda, maka itu adalah heteroskedastisitas. Mengetahui hubungan antara variabel independen dengan nilai residu mutlak adalah tujuan dari pengujian ini. Uji *glejser* digunakan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Jika hasilnya lebih besar dari t-signifikansi ($\alpha = 5\%$) maka tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2019).

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dirancang untuk menguji apakah model regresi telah mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2017). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas diuji dengan menghitung *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Pengambilan keputusan untuk menentukan adanya multikolinieritas didasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau jika *VIF* > 10 atau jika maka terjadi multikolinieritas dengan model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau jika *VIF* < 10 atau maka tidak terjadi multikolinieritas dengan model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Dalam menguji apakah ada korelasi antara *confounding error* periode t dan *confounding error* periode t_0 (sebelumnya), maka uji autokorelasi dapat digunakan. Tidak mengandung autokorelasi dalam uji ini mengartikan bahwa model regresi sudah layak (Ghozali, 2017). Jika terdapat korelasi, maka disebut masalah autokorelasi. Uji statistik dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test) untuk mendeteksi autokorelasi dan menguji korelasi level satu memerlukan bagian (konstanta) dalam model regresi, tanpa variabel lain di dalam variabel independen. Uji DW dijalankan dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 = tidak ada autokorelasi ($r=0$)
- b. H_1 = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Skor DW setelah diolah kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $dW < dL$, ada autokorelasi positif
- b. $dW > 4 - dL$, ada autokorelasi negative
- c. $dU < dW < 4 - dU$, tidak terjadi autokorelasi
- d. $dL < dW < dU$, tidak dapat disimpulkan
- e. $4 - dU < 4 - dL$, tidak dapat disimpulkan

3.5.2.3 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai sebenarnya dapat diukur dengan *goodness of fit*. Secara statistik, hal ini dapat diukur setidaknya dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dianggap signifikan secara statistik jika nilai uji statistik berada dalam rentang kritis (rentang di mana H_0 ditolak). Sebaliknya, jika nilai uji statistik berada dalam kisaran H_0 yang dapat diterima, maka dikatakan tidak signifikan.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Perubahan jenis variabel independen dapat menjelaskan adanya perubahan pada nilai variabel dependen pada uji koefisien determinasi (Santosa dan Ashari, 2005). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Kekuatan variabel independen dalam menafsirkan variabel terikat sangat kecil jika nilai R^2 lebih kecil atau mendekati nol. Untuk menghasilkan hasil regresi yang baik, nilai R^2 harus lebih besar atau mendekati satu sehingga variabel independen dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2017).

2. Uji t-test

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan bagaimana pengaruh variabel penjelas independen memengaruhi penjelasan individu terhadap variasi variabel dependen. Alasan keputusan: H_0 diterima jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel, tetapi H_0 ditolak jika t-hitung lebih besar dari t-tabel. Uji-t juga dapat dilakukan hanya untuk mengonfirmasi signifikansi-t dari masing-masing variabel yang terdapat dalam hasil regresi yang dikeluarkan oleh SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari (0,05), maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali 2017).

3.5.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan pengujian ini adalah apakah variabel pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KPI = a + b_1 PE + b_2 PAD + b_3 BM + b_4 KPD + b_5 UPD + e$$

KPI = Kelemahan Pengendalian Internal

a = Konstanta

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

UP = Ukuran Pemerintah Daerah

e = Error

b1-b5 = Koefisien Regresi

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Persamaan regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis data statistik dengan cara diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan pengujian asumsi klasik dengan aplikasi SPSS versi 25. Prosedurnya diawali dengan menginput variabel independen: pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah dan variabel dependen: kelemahan pengendalian internal.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2018 – 2020 menjadi objek penelitian ini. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Total
1	Jumlah seluruh kab/kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2020	10
2	Kab/Kota yang tidak termasuk kriteria sampel: a. Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memiliki laporan realisasi APBD pada tahun anggaran 2018-2020 dan telah di audit oleh BPK. b. Kab/Kota yang tidak menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK. c. Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dalam PDRB min 3 tahun pada tahun 2018-2020.	(0) (0) (0)
3	Jumlah Sampel Penelitian	10

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Kriteria	Total
4	Jumlah Observasi Penelitian Selama 3 Tahun (10×3 Tahun)	30
5	Data Sampel yang di Outliner	(0)
	Total Keseluruhan Sampel	30

4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Pada penelitian ini Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah menyediakan data yang dapat digunakan untuk dijadikan sampel penelitian. Ringkasan sampel penelitian ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020 dan sesuai dengan kriteria sampel

No	Nama Kabupaten/Kota
1	Berau
2	Kutai Barat
3	Kutai Kertanegara
4	Kutai Timur
5	Mahakam Ulu
6	Paser
7	Penajam Paser Utara
8	Balikpapan
9	Bontang
10	Samarinda

4.2. Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif membantu memberikan gambaran tentang apa yang sedang diselidiki. Untuk menampilkan data statistik umum, peneliti menggunakan deskripsi variabel yang diukur pada skala rasio dan frekuensi variabel yang diukur pada skala nominal seperti yang di tunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPI	30	2,00	13,00	7,5000	2,66199
PE	30	,05	13,67	5,2250	3,42733
PAD	30	17,41	764,09	264,7103	205,25222
BM	30	255,34	1286,54	675,1053	299,19411
KPD	30	21,00	71,00	45,1000	18,82835
UPD	30	29989,00	872768,00	376137,7000	278013,68962
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh sampel penelitian adalah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dikali tiga tahun penelitian dengan total N sebesar 30.
2. Variabel KPI (Kelemahan Pengendalian Internal) memiliki nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 13,00, dengan nilai rata-rata sebesar 7,5000 dan standar deviasi sebesar 2,66199. Hal ini berarti KPI berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean (Ghozali, 2017).

3. Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan PAD memiliki nilai minimum 17,41 dan nilai maksimum 764,09, dengan nilai rata-rata sebesar 264,7103 dan standar deviasi sebesar 205,25222. Hal ini berarti PAD berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean.
4. Variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) dibandingkan dengan PDRB memiliki nilai minimum 0,05 dan nilai maksimum 13,67, dengan nilai rata-rata sebesar 5,2250 dan standar deviasi sebesar 3,42733. Hal ini berarti PE berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean.
5. Variabel UPD (Ukuran Pemerintah Daerah) dibandingkan dengan jumlah penduduk memiliki nilai minimum 29.989 dan nilai maksimum 872.768, dengan nilai rata-rata sebesar 376.137,70 dan standar deviasi sebesar 278.013,690. Hal ini berarti UPD berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean.
6. Variabel BM (Belanja Modal) dibandingkan dengan BM memiliki nilai minimum 255,34 dan maksimum 1286,54, dengan nilai rata-rata sebesar 675,1053 dan standar deviasi sebesar 299,19411. Hal ini berarti BM berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean.
7. Variabel KPD (Kompleksitas Pemerintah Daerah) dibandingkan dengan jumlah SKPD memiliki nilai minimum 21,00 dan maksimum 71,00, dengan nilai rata-rata sebesar 45,1000 dan standar deviasi sebesar 18,82835. Hal ini

berarti KPD berjalan dengan baik karena standar deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mean.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Terdistribusinya variabel independen ataupun dependen secara normal atau tidak dapat dilihat dengan uji normalitas. Data penelitian yang baik adalah data yang memenuhi asumsi kenormalan data. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12350283
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,069
	Negative	-,096
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas diketahui nilai signifikansi (*two-tailed*) $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah variabel pengganggu dalam suatu penelitian memiliki varians yang sama. Peneliti menggunakan uji *glejser* untuk mengetahui ada tidaknya varians yang tidak seragam (heteroskedastisitas) dengan meregresi nilai absolut variabel independen. Jika variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, terdapat bukti varians yang heterogen. Hasil uji *glejser* dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Batas Signifikansi	Keterangan
PAD	0,957	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
PE	0,972	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
UPD	0,798	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
BM	0,785	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KPD	0,427	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan Uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* pada tabel di atas diketahui nilai signifikansi variabel independen PAD (Pendapatan Asli Daerah), PE (Pertumbuhan Ekonomi), UPD (Ukuran Pemerintah Daerah), BM (Belanja Modal), dan KPD (Kompleksitas Pemerintah Daerah) lebih besar dibandingkan dengan 0,05,

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel independen dari model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance (>0,1)	Batasan Tolerance	Nilai VIF	Batasan VIF (<10)	Keterangan
PAD	0,166	0,1	6,032	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
PE	0,867	0,1	1,154	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
UPD	0,145	0,1	6,874	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
BM	0,554	0,1	1,804	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
KPD	0,465	0,1	2,153	10	Tidak terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan Uji Multikolinearitas pada tabel di atas maka dapat disimpulkan nilai *tolerance* dan VIF dari tiap variabel independen untuk variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,166 dan 6,032, PE (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 0,867 dan 1,154, UPD (Ukuran Pemerintah Daerah) sebesar 0,145 dan 6,874, BM (Belanja Modal) sebesar 0,554 dan 1,804, dan KPD (Kompleksitas Pemerintah Daerah) sebesar 0,465 dan 2,153. Sehingga dapat disimpulkan tidak

terjadi multikolinearitas dikarenakan setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

4. Uji Autokorelasi

Salah satu uji asumsi klasik untuk dapat memastikan ada tidaknya autokorelasi dalam data penelitian yaitu uji autokorelasi. Tidak adanya autokorelasi berarti data penelitian sudah layak untuk diuji. Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi, peneliti menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) sebagai Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Persamaan yang digunakan	Batasan dL	<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
$dW > dL$	1,070	1,670	Tidak terjadi Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi *durbin-watson* diperoleh nilai dW sebesar 1,670 dengan total sampel sebanyak 30 serta total variabel independen (K) sebanyak 5, maka nilai *durbin-watson* akan didapat dL sebesar 1,070 dan dU sebesar 1,832 dengan kesimpulan bahwa $dW > dL$ ($1,670 > 1,070$) maka berarti tidak terjadi autokorelasi.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen adalah uji analisis regresi linear berganda. Uji ini hanya dapat dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Keseluruhan	PAD	PE	UPD	BM	KPD
Nilai Konstanta	5,088	-0,002	-0,16	3835E-6	-0,003	-0,082

$$KPI = 5,088 - 0,002PAD - 0,016PE + 3,935E-6UPD + e - 0,003BM + 0,082KPD$$

Keterangan: KPI = Kelemahan Pengendalian Internal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 PE = Pertumbuhan Ekonomi
 UPD = Ukuran Pemerintah Daerah
 BM = Belanja Modal
 KPD = Kompleksitas Pemerintah Daerah

Interpretasi persamaan di atas sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 5,088 menunjukkan bahwa belum ada pengaruh dari kelima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah yang memengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Kelemahan Pengendalian Internal tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien PAD sebesar -0,002, mengartikan jika variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap kelemahan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel PAD, maka akan menurunkan KPI sebesar 0,002.

3. Nilai koefisien PE sebesar -0,016, mengartikan jika variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap kelemahan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel PE, maka akan menurunkan KPI sebesar 0,016.
4. Nilai koefisien UPD sebesar $3,935E-6$ ($3,935 \times 10^{-6} = 0,000004$) mengartikan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang searah terhadap kelemahan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel UPD, maka akan menaikkan KPI sebesar 0,000004.
5. Nilai koefisien BM sebesar -0,003, mengartikan jika variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap kelemahan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel BM, maka akan menurunkan KPI sebesar 0,003.
6. Nilai koefisien KPD sebesar 0,082, mengartikan jika variabel Kompleksitas Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang searah terhadap kelemahan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel KPD, maka akan menaikkan KPI sebesar 0,082.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*Godness of fit*)

Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Kekuatan variabel independen dalam menafsirkan variabel terikat sangat kecil jika nilai R^2 lebih kecil atau mendekati nol. Untuk menghasilkan hasil regresi yang baik, nilai R^2 harus lebih besar atau mendekati satu sehingga variabel independen dapat menyediakan

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut Tabel

4.9 *goodness of fit* untuk mengetahui R-squared pada penelitian:

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (*Godness of Fit Test*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,603 ^a	,364	,231	2,33424

a. Predictors: (Constant), UPD, PE, BM, KPD, PAD

b. Dependent Variable: KPI

Berdasarkan tabel di atas, *R Square* diketahui sebesar 0,364, hal ini berarti pengaruh variabel independen PAD (Pendapatan Asli Daerah), PE (Pertumbuhan Ekonomi), UPD (Ukuran Pemerintah Daerah), BM (Belanja Modal), dan KPD (Kompleksitas Pemerintah Daerah) berkorelasi terhadap variabel dependen yaitu KPI (Kelemahan Pengendalian Internal) adalah 36,4%. Sedangkan sebesar 63,6% dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji t-test

Uji t-test digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 25 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.10 t-test

Hipotesis	Hubungan	Signifikasi	t-hitung	Keterangan
H1	PAD => KPI	0,671	-0,430	Tidak didukung
H2	PE => KPI	0,910	-0,114	Tidak didukung
H3	UPD => KPI	0,357	0,938	Tidak didukung
H4	BM => KPI	0,128	-1,576	Tidak didukung
H5	KPD => KPI	0,023	2,437	Didukung

T-tabel= $t(0,05/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 30-5-1) = t(0,025 ; 24) = 2,06390$.

t: t-hitung > 2,063

Signifikasi: *p < 0,05

Tabel di atas memberikan penjelasan atas pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel ini menunjukkan nilai t-hitung dan nilai signifikansi masing-masing variabel. Nilai t-tabel pada penelitian ini adalah 2,063. Berikut akan dijelaskan pengaruh setiap variabel yang bersangkutan:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-hitung -0,430 lebih kecil dibanding t-tabel 2,063 menunjukkan variabel ini mempunyai hubungan negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah 0,671 > 0,05 berarti variabel PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
2. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai t-hitung -0,114 lebih kecil dibanding t-tabel 2,063 menunjukkan variabel ini mempunyai hubungan negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Nilai signifikansi Pertumbuhan Ekonomi 0,910 > 0,05 berarti variabel PE tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
3. Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai t-hitung 0,938 lebih kecil dibanding t-tabel 2,063 menunjukkan variabel ini mempunyai hubungan negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Nilai signifikansi Ukuran Pemerintah Daerah 0,357 > 0,05 berarti variabel UPD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
4. Belanja Modal memiliki nilai t-hitung -1,576 lebih kecil dibanding t-tabel 2,063 menunjukkan variabel ini mempunyai hubungan negatif terhadap

kelemahan pengendalian internal. Nilai signifikansi Belanja Modal $0,128 > 0,05$ berarti variabel BM tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

5. Kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki nilai t-hitung 2,437 lebih besar dibanding t-tabel 2,063 menunjukkan variabel ini mempunyai hubungan positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Nilai signifikansi Kompleksitas Pemerintah Daerah $0,023 < 0,05$ berarti variabel KPD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

4.5. Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Penelitian ini mendapatkan hasil pengaruh pada variabel pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh negatif dengan diketahuinya t-hitung $< t$ -tabel ($0,430 < 2,063$) dan nilai signifikansinya $0,671 > 0,05$ sehingga dalam hal ini H1 tidak didukung. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak berpengaruh terhadap terjadinya kelemahan pengendalian internal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci (2021), Saputro (2014), dan Rachmawati (2016) jika pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Minimnya pengaruh PAD atas lemahnya pengendalian internal ini dapat terjadi karena banyaknya pejabat daerah yang sudah tertangkap akibat penyelewengan dana APBD, membuat pendapatan asli daerah mendapatkan pengawasan lebih yang bertujuan agar

Pemerintah Daerah dapat menjalankan kebijakan secara efektif untuk kepentingan rakyat. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Nurwati (2015), Puspitasari (2013), (Mustikasari, 2021), dan (Samhah, 2015) yang menyatakan jika pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki pendapatan asli daerah yang cukup meningkat dan tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Hal ini diimplikasikan dengan cara pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah telah dilakukan oleh para masyarakat daerah secara rutin sehingga pendapatan asli daerah tersebut mendapatkan pemasukan yang konsisten.

4.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur disimpulkan terdapat pengaruh negatif antara dua variabel ini dengan diketahuinya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,114 < 2,063$) dan nilai signifikansinya $0,910 > 0,05$ sehingga dalam hal ini H2 tidak didukung. Hubungan negatif atau berlawanan mengartikan bahwa Pemerintah Daerah dengan pertumbuhan yang pesat belum tentu memiliki pengendalian internal yang baik dari Pemerintah Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sebagian besar daerah cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat,

namun dengan pertumbuhan yang baik, jumlah kasus kelemahan pengendalian internal tidak serta merta bertambah atau berkurang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurwati (2015) menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah tidak memengaruhi lemahnya pengendalian internal, yang disebabkan penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan perubahan tingkat PDRB tahunan. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011), Puspitasari (2013), Samhah (2015), dan Rachmawati (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Hal ini diimplikasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 rata-rata meningkat yang berarti meskipun dengan aktivitas bisnis yang tinggi di daerah tersebut, Pemerintah Daerah sudah berhasil mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi seperti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

4.5.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel ukuran Pemerintah Daerah dengan variabel kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur didapatkan nilai t-hitung $< t$ -tabel ($0,938 < 2,063$) dan signifikansinya $0,357 > 0,05$ sehingga dalam hal ini H3 tidak didukung. Sehingga dapat disimpulkan kasus kelemahan pengendalian internal tidak terpengaruh oleh penambahan dan pengurangan ukuran (populasi).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Nurwati (2015), Martani dan Zaelani (2011), Saputro (2014), dan Mustikasari (2021) menyimpulkan bahwa variabel ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Tetapi hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci (2021) menjelaskan bahwa variabel ukuran pemerintahan daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki populasi yang terus meningkat setiap tahunnya dan tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Hal ini diimplikasikan dengan pemerintahan daerah yang sudah baik dalam mengelola masyarakatnya yang selalu bertambah dan bisa tetap menjaga dengan konsisten dalam pengelolaan catatan penduduk sipil.

4.5.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Di dalam penelitian ini pengaruh belanja modal yang dihubungkan dengan kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai t-hitung $< t$ -tabel ($1,576 < 2,063$) dan nilai signifikansinya $0,128 > 0,05$ sehingga dalam hal ini H4 tidak didukung. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan negatif antara belanja modal dan kelemahan pengendalian internal dapat

diartikan sebagai pengurangan jumlah kasus pengendalian internal ketika anggaran investasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah meningkat. Akibatnya, Pemerintah Daerah berusaha untuk membangun pengendalian internal yang tepat dan sesuai untuk pengelolaan belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Saputro (2014), Samhah (2015), Rachmawati (2016) dan Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara belanja modal dengan kelemahan pengendalian internal. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian menurut Nurwati (2015) dan Suci (2021) menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran anggaran (belanja modal) yang besar dan tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Hal ini diimplikasikan dengan pemerintahan yang aktif dalam memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya dengan membeli tanah, jalan, irigasi, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan belanja fisik lainnya serta hasil belanja modal yang tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal berarti pemerintahan sudah memiliki tata kelola yang baik dalam hal pengendalian internal atas kecurangan-kecurangan seperti penipuan, ataupun korupsi dalam birokrasi pemerintahan.

4.5.5 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pada penelitian ini didapatkan pengaruh dari variabel kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2,437 > 2,063$) dan nilai signifikansinya $0,023 < 0,05$ sehingga dalam hal ini H_5 diterima. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya kompleksitas pemerintah, maka kelemahan pengendalian internal juga akan meningkat. Pemerintah Daerah dengan jumlah kecamatan yang banyak akan sangat terdiversifikasi, sehingga pengendalian internal menjadi lebih kompleks. Banyaknya kecamatan di setiap wilayah akan membuat pengendalian internal sulit untuk dilaksanakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Puspitasari (2013) dan Mustikasari (2021) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian oleh Martani dan Zaelani (2011), Saputro (2014), dan Rachmawati (2016) menjelaskan bahwa kompleksitas Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui dalam pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlalu banyak sehingga menyebabkan tingginya kompleksitas pemerintahan daerah ini. Hal ini dapat diimplikasikan dengan cara pemda dapat memperkecil dan memperpadat jumlah SKPD seperti dinas perumahan dan pemukiman dapat digabungkan dengan dinas pertanahan dan penataan ruang, dinas ketenagakerjaan dapat digabung dengan dinas pekerjaan umum dsb. Sehingga SKPD dapat dikurangi agar dapat memperkecil adanya kelemahan pengendalian internal

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel dependen (Kelemahan Pengendalian Internal) dan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah) di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak berpengaruh terhadap terjadinya kelemahan pengendalian internal.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengendalian internal yang baik dari suatu Pemerintah Daerah belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
3. Variabel ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penambahan dan pengurangan ukuran (populasi) tidak memengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian internal.

4. Variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat diketahui jika anggaran belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah besar maka jumlah kasus pengendalian internal akan berkurang.
5. Variabel kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya kompleksitas pemerintah, maka kelemahan pengendalian internal juga akan meningkat.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Kontribusi

Sebagai kontribusi ke depannya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru atau suplemen yang berkaitan bagi para akademisi di masa mendatang yang tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah dan memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke depannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi untuk membantu dalam mengurangi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi variabel independen yang dapat dijadikan acuan untuk Pemerintah Daerah lainnya untuk dapat memperbaiki kelemahan pengendalian internal:

1. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah telah dilakukan oleh para masyarakat daerah secara rutin sehingga pendapatan asli daerah tersebut mendapatkan pemasukan yang konsisten.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 rata-rata meningkat yang berarti meskipun dengan aktivitas bisnis yang tinggi di daerah tersebut, Pemerintah Daerah sudah berhasil mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi seperti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
3. Pemerintahan daerah yang sudah baik dalam mengelola masyarakatnya yang selalu bertambah dan bisa tetap menjaga dengan konsisten dalam pengelolaan catatan penduduk sipil.
4. Pemerintahan yang aktif dalam memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya dengan membeli tanah, jalan, irigasi, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan belanja fisik lainnya serta hasil belanja modal yang tidak memengaruhi kelemahan pengendalian internal berarti pemerintahan sudah memiliki tata kelola yang baik dalam hal pengendalian internal atas kecurangan-kecurangan seperti penipuan, ataupun korupsi dalam birokrasi pemerintahan.

5. Pemda dapat memperkecil dan memperpadat jumlah SKPD seperti dinas perumahan dan pemukiman dapat digabungkan dengan dinas pertanahan dan penataan ruang, dinas ketenagakerjaan dapat digabung dengan dinas pekerjaan umum dsb. Sehingga SKPD dapat dikurangi agar dapat memperkecil adanya kelemahan pengendalian internal.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Batasan yang termasuk dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hasil penelitian hanya terbatas pada situasi di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu 3 tahun (2018 – 2020), di mana apabila kurun waktu penelitian lebih lama (>3 tahun) atau penelitian lebih luas hingga pada Pemerintah Daerah kota/kabupaten Se-Indonesia, tidak menutup kemungkinan dapat menghasilkan output yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen (pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah Daerah, belanja modal, dan kompleksitas Pemerintah Daerah) yang diduga berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

5.3.2 Saran Penelitian

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang disarankan terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan dan memelihara pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi kelemahan-kelemahannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas jangkauan hingga tidak terbatas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan dengan jangka waktu yang lebih panjang agar penelitian yang diperoleh menghasilkan nilai yang lebih akurat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengubah atau menambah variabel independen untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi melebihi 50% yang pada penelitian ini hanya sebesar 36,4% untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H. dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu. (Issue March).
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing and assurance services. In *Book1*.
- BPK RI. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II -2018 (Vol. 6, Issue c). Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.
- BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II -2019 (Vol. 6, Issue c). Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.
- BPK RI. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II -2020 (Vol. 6, Issue c). Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK
- BPS Provinsi Kalimantan Timur (2018). Kalimantan Timur dalam Angka 2018. lampung.bps.go.id diakses pada 16 Mei 2022
- BPS Provinsi Kalimantan Timur (2019). Kalimantan Timur dalam Angka 2019. lampung.bps.go.id diakses pada 16 Mei 2022
- BPS Provinsi Kalimantan Timur (2020). Kalimantan Timur dalam Angka 2020. lampung.bps.go.id diakses pada 16 Mei 2022
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020). Data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2020. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 15 Mei 2022.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1-2). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.003>
- Ghozali, I. (2017). Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, R. (2014). Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2011. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. IAI Global. In *IAI Global*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global. In *IAI Global*.
- Indonesia, D. P. R. R. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. In *Unisia*.
- Larassati, R, R. Anggraini dan E. Gerendrawaty. (2013). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Periode

- 2009-2010. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XXVI. Manado.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*.
- Martani, D., & Zaelani, F. (2011). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21–22.
- Maruta, H. (2015). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal STIE Syariah Bengkalis*, 16–28.
- Mauro, Paulo. (1998). Corruption and the Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics* Vol. 69: 263-279
- Mulyadi, Eddy Soepardi (2007), Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara, *Jurnal Economics Business & Accounting Review* Volume II, Nomor 1, 2007
- Mustikasari, F. A. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016-2018. 6.
- Nurwati, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Ii*, 1–15.
- Prov Kaltim (2020). Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2018-2020. <http://kaltimprov.go.id/>. Diakses pada 15 Mei 2022.
- Purniasari, C. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2014).Prosiding Seminar Nasional. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Puspitasari, T. (2013). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Putri Agustina, G. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Rachmawati, D. E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Restuningdiah, Nurika dan Nur Indriantoro. (2000). Pengaruh Partisipasi terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan Pengaruh Pemakai sebagai Moderating Variable. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3, No. 2 : 119-133.
- Risnawati, A. S., & Nurwati. (2015). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang *Varia*. 11(1), 65–75.
- Sahari, HaryantodanDudi M. Kurniawan (2007), Peranan Akuntan dalam Mendeteksi dan Mencegah Fraud, *Jurnal Economics Business & Accounting*

- Review Volume II, Nomor 1, 2007
- Samhah, H. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 22, 1–19.
- Saputro, E. A., & Mahmud, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Styaningrum, F. (n.d.). *Analysis of the Internal Control System in Realizing Transparency and Accountability in the Regional Civil Service Agency*. 1157–1170.
- Suci, S. A. (2021). Pendapatan Asli Daerah (Pad), Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Di. <https://www.neliti.com/publications/131448/pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-pendapatan-asli-daerah-pad-kompleksitas-daerah-dan>
- Sukirno, Sardono. (1996). Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi 2. Jakarta: PT. GrafindoPersada.
- Sularno, Fitria Megawati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Modal: Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Skripsi Sarjana. FE Universitas Widyatama. Bandung.
- Todaro, M. P. (1995). *Reflections on economic development. Books*.
- Tricker, R. I. (1984). Tricker, Corporate Governance. Practices, procedure and powers in British Companies and their board of directors. *Revue Internationale de Droit Comparé*, 36(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (2004). Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003). Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun (1999). Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014). Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun (2006). Pajak Daerah
- Warren. (2003). *Accounting. 20th edition. South Western. Mason- Ohio*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Pengumpulan Data

Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Total
1	Jumlah seluruh kab/kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2020	10
2	Kab/Kota yang tidak termasuk kriteria sampel: a. Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memiliki laporan realisasi APBD pada tahun anggaran 2018-2020 dan telah di audit oleh BPK. b. Kab/Kota yang tidak menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK. c. Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dalam PDRB min 3 tahun pada tahun 2018-2020.	(0) (0) (0)
3	Jumlah Sampel Penelitian	10
4	Jumlah Observasi Penelitian Selama 3 Tahun (10×3 Tahun)	30
5	Data Sampel yang di Outliner	(0)
	Total Keseluruhan Sampel	30

Kabupaten/ Kota yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1	Berau
2	Kutai Barat
3	Kutai Kertanegara
4	Kutai Timur
5	Mahakam Ulu
6	Paser
7	Penajam Paser Utara
8	Balikpapan
9	Bontang
10	Samarinda

Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen

Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Persen)

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	5,62	3,83	9,34
2	Kutai Barat	5,06	5,69	2,85
3	Kutai Kertanegara	2,15	3,91	4,21
4	Kutai Timur	6,37	4,64	13,67
5	Mahakam Ulu	7,42	8,24	1,74
6	Paser	9,32	0,05	9,96
7	Penajam Paser Utara	4,68	2,78	0,79
8	Balikpapan	11,38	7,61	1,23
9	Bontang	0,16	1,32	4,03
10	Samarinda	8,76	6,35	1,59

Sumber : www.bps.go.id yang di olah

Pendapatan Asli Daerah (Dalam Miliar Rupiah)

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	210,44	231,02	233,26
2	Kutai Barat	96,51	168,90	147,34
3	Kutai Kertanegara	303,93	552,43	450,60
4	Kutai Timur	144,59	207,99	214,02
5	Mahakam Ulu	17,41	18,51	20,91
6	Paser	149,41	166,15	173,32
7	Penajam Paser Utara	70,39	93,49	88,14
8	Balikpapan	646,87	764,09	609,06
9	Bontang	199,48	218,74	199,79
10	Samarinda	498,89	560,44	485,19

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id yang di olah

Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	635,12	1.286,54	863,10
2	Kutai Barat	441,48	560,11	460,54
3	Kutai Kertanegara	593,77	1.151,29	1.131,61
4	Kutai Timur	843,10	1.064,61	846,73
5	Mahakam Ulu	255,34	273,89	345,11
6	Paser	530,02	871,39	571,33
7	Penajam Paser Utara	647,84	550,17	361,34
8	Balikpapan	608,34	687,77	428,69
9	Bontang	333,74	483,78	336,34
10	Samarinda	817,18	1.206,78	1.066,11

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id yang di olah

Daftar SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	65	65	65
2	Kutai Barat	22	22	22
3	Kutai Kertanegara	37	37	37
4	Kutai Timur	47	47	47
5	Mahakam Ulu	28	28	28
6	Paser	58	58	58
7	Penajam Paser Utara	33	33	33
8	Balikpapan	71	71	71
9	Bontang	21	21	21
10	Samarinda	69	69	69

Sumber : www.bps.go.id yang di olah

Ukuran Pemerintah Daerah

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	226.509	232.287	248.035
2	Kutai Barat	155.268	159.331	165.938
3	Kutai Kertanegara	701.142	692.776	729.382
4	Kutai Timur	420.760	422.905	434.334
5	Mahakam Ulu	29.989	32.163	35.010
6	Paser	279.975	285.894	291.573
7	Penajam Paser Utara	159.386	160.912	162.518
8	Balikpapan	645.727	852.046	668.318
9	Bontang	174.206	177.722	181.183
10	Samarinda	858.080	872.768	827.994

Sumber : www.bps.go.id yang di olah

Daftar Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2018, 2019, 2020

Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Provinsi	2018	2019	2020
1	Berau	5	8	4
2	Kutai Barat	4	8	5
3	Kutai Kertanegara	5	3	7
4	Kutai Timur	6	7	10
5	Mahakam Ulu	2	4	2
6	Paser	9	6	8
7	Penajam Paser Utara	7	10	8
8	Balikpapan	12	11	8
9	Bontang	9	6	7
10	Samarinda	8	8	11

Sumber : www.bpk.go.id yang di olah

Lampiran 3 Hasil Olah Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPI	30	2,00	13,00	7,5000	2,66199
PE	30	,05	13,67	5,2250	3,42733
PAD	30	17,41	764,09	264,7103	205,25222
BM	30	255,34	1286,54	675,1053	299,19411
KPD	30	21,00	71,00	45,1000	18,82835
UPD	30	29989,00	872768,00	376137,7000	278013,6896
Valid N (listwise)	30				2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12350283
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,096
	Positive	,069
	Negative	-,096
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Batas Signifikansi	Keterangan
PAD	0,957	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
PE	0,972	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
UPD	0,798	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
BM	0,785	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KPD	0,427	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance (>0,1)	Batasan Tolerance	Nilai VIF	Batasan VIF (<10)	Keterangan
PAD	0,166	0,1	6,032	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
PE	0,867	0,1	1,154	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
UPD	0,145	0,1	6,874	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
BM	0,554	0,1	1,804	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
KPD	0,465	0,1	2,153	10	Tidak terjadi Multikolinearitas

Uji Autokorelasi

Persamaan yang digunakan	Batasan dL	<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
dW>dL	1,070	1,670	Tidak terjadi Autokorelasi

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Keseluruhan	PAD	PE	UPD	BM	KPD
Nilai Konstanta	5,088	-0,002	-0,16	3835E-6	-0,003	-0,082

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,603 ^a	,364	,231	2,33424

a. Predictors: (Constant), UPD, PE, BM, KPD, PAD

b. Dependent Variable: KPI

Uji t-test

Hipotesis	Hubungan	Signifikasi	t-hitung	Keterangan
H1	PAD => KPI	0,671	-0,430	Tidak didukung
H2	PE => KPI	0,910	-0,114	Tidak didukung
H3	UPD => KPI	0,357	0,938	Tidak didukung
H4	BM => KPI	0,128	-1,576	Tidak didukung
H5	KPD => KPI	0,023	2,437	Didukung